BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1969 melalui Repelita adalah pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan tersebut tidak hanya mencakup bidang ekonomi, politik, ideologi, serta sosial budaya dan hankam.

Didalam bidang ekonomi sektor pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjukan. Perihal kekayaan ini dapat terjadi karena hibah atau karena adanya paksaan. Oleh karena itu agar pungutan pajak ini tidak dikatakan sewenang-wenang maka harus diatur dalam suatu undang-undang peraturan. Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal, yaitu merupakan kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah harus berdasarkan undang-undang

Sistem pemungutan pajak yang berlaku mulai tahun 1984 menggunakan sistem Self Assesment, yaitu sistem yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga pelaksanaan admiinstrasi perpajakan diharapkan supaya dapat lebih rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Dengan sistem Self Assesment

ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran undang-undang yang berlaku misalnya dengan sengaja tidak melaporkan pajak terutang yang seharusnya dibayar, sehingga Pengawasan pembayaran Pajak terutang merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak demi lancarnya proses perpajakan .

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ada dipemerintah kita, berasal dari pendapatan rakyat yang pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum. Pelaksanaan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya.

Pengawasan pembayaran pajak penghasilan penting dalam dunia perpajakan, karena dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak oleh karena itu, penulis tertarik terhadap masalah pengawasan, sehingga penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini mengambil judul **"PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN TERHADAP PENERIMAAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR".**

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memahami jalannya pelaksanaan pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan badan terhadap penerimaan.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
2. Untuk mengetahui masalah yang timbul pada Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
3. Untuk mengetahui analisa pemecahan masalah Pengawasan Pembayaran masa PPh Badan Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

1.3. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini metode yang digunakan adalah studi kasus (case Study) yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis, atau menguraikan kemudian menarik kesimpulan. Adapun data-data yang digunakan penulis dalamlaporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

   Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan dan membaca buku-buku, atau bahan materi dari sumber lain diperpustakaan yang berhubungan dengan masalah perpajakan.

2. Riset Lapangan (Field Research)

   Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap subjek pajak. Sedangkan teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara (Interview Research)

   Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara baik wawancara yang berstruktur terhadap pihak yang berwenang dalam hal ini kantor pelayanan pajak Bogor.

2. Pengamatan (observasi)

   Teknik yang dilakukan dengan cara mengamati dan memperhatikan kegiatan karyawan di kantor pelayanan pajak Bogor.

1.4. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang penelitian , penulis mencoba membatasi beberapa per masalahan yang berkaitan dengan pengawasan pembayaran masa PPh badan yang dilaksanakan di kantor pelayanan pajak Bogor yaitu :

1. Bagaimana pengawasan pembayaran masa PPh badan di kantor pelayanan pajak Bogor.
2. Bagaimana masalah yang timbul pada pengawasan pembayaran masa PPh badan di kantor pelayanan pajak Bogor.
3. Bagaimana analisa pemecahan masalah pengawasan pembayaran masa PPh badan di kantor pelayanan pajak Bogor.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika yang dipergunakan dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Yang dibahas dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, pembatasan masalah, sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yang di bahas yaitu pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, fungsi pengawasan, metode pengawasan, prosedur pengawasan . Juga dalam bab ini di bahas dalam pengertian pajak penghasilan di bagi dalam sub judul yang membahas pengertian pajak, pengertian objek pajak, pengertian subyek pajak, pengertian subyek pajak, pengertian tarif pajak, pengertian pajak penghasilan badan.

BAB III. DATA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini di bahas sejarah singkat kantor pelayanan pajak Bogor, struktur organisasi, tugas dan wewenang kantor pelayanan pajak Bogor. Adapun yang menjadi pembahasan dalam bab ini antara lain pengawasan pembayaran masa PPh badan yang di uraikan dalam sub judul antara lain penerimaan surat setoran pajak, pengelompokan surat setoran pajak menurut NPWP, pencatatan surat setoran pajak kedalam tabelaris, pengadministrasian surat setoran pajak, pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak.

BAB IV. ANALISA HASIL PENELITIAN

Yang dibahas dalam bab ini yaitu pengawasan pembayaran masa PPh badan terhadap Penerimaan, kendala-kendala yang dihadapi dan usaha-usaha dalam pengawasan pembayaran masa PPh badan terhadap penerimaan, prosedur penerbitan surat tagihan pajak. Yang menjadi pembahasan dalam sub judul bab

ini yaitu pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak, saat di terbitkannya surat tagihan pajak. Pencatatan surat setoran pajak kedalam tabelaris dan tata cara perhitungan pajak terutang.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Yang disimpulkan dalam bab terakhir ini hanya kesimpulan, saran-saran yang bersifat membangun.